

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)

Monika Khairunnisa Suwita

Sendi Gusnandar Anran

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas Widyatama

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan perhitungan korelasi *pearson product moment* diperoleh r_s sebesar 0,584 dan koefisien determinasi sebesar 34,1%. Dari statistik uji t dapat dilihat bahwa $t_{hitung} = 3,806$ dan $t_{tabel} = 2,048$, sehingga $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik (Sari, 2013).

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan payung hukum pemerintah daerah yang antara lain adalah mengenai pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan daerah (Juwita, 2013).

Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini, di masa lalu negara ataupun pemerintah sangat dominan, menjadikan masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam setiap proses pembangunan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelenggarakan pemerintahan yang baik merupakan hal yang wajar. Saat ini tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pembenahan (Sari, 2013).

Beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) juga sedang disiapkan. Semuanya dimaksudkan untuk memperjelas bahwa kita menginginkan pemerintah daerah yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkesinambungan. Arahan seperti itu adalah keharusan, karena dengan model pemerintah tersebut pembangunan bagi seluruh rakyat dapat terlaksanakan. Implementasi berbagai program pemerintah akan berjalan dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Undang-undang No. 17 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK yang di maksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Juwita, 2013).

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah. Opini *disclaimer* (tanpa memberikan pendapat) diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan

penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan (Udiyanti dkk, 2014).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (Nurlaila, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul Penelitian : **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)”**.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraha, 2009).

Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan (Sari, 2013).

2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Nugraha, 2009).

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan, merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Pernyataan dalam laporan keuangan daerah dapat bersifat implisit dan eksplisit mengenai: keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan dan ketaatan dan kepatuhan (Silviana, 2013).

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_a : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

Metode pengambilan sampel yang diambil dari populasi menggunakan sampel Jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis menetapkan jumlah anggota sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian Akuntansi dan Aset pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dengan 30 anggota sampel.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010)	PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan	Tujuan Laporan Keuangan	Interval
		Tanggungjawab Laporan Keuangan	
		Komponen Laporan Keuangan	
		Identifikasi Laporan Keuangan	
Kualitas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010)	Relevan	Memiliki Manfaat Umpan Balik	Interval
		Memiliki Manfaat Prediktif	
		Tepat Waktu	
	Andal	Lengkap	Interval
		Penyajian Jujur	
		Dapat Diverifikasi	
	Dapat Dibandingkan	Dapat Dibandingkan	Interval
Dapat Dipahami	Dapat Dipahami	Interval	

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Setelah dilakukan uji validitas hasil pengujian atas item kuisioner menunjukkan nilai terendah adalah 0,462 dan nilai tertinggi 0,829, dengan demikian hasil perngujian lebih besar dari 0,30 maka item dari kuisioner tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item pernyataan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan reliabel (nilai koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 yaitu 0,837 dan 0,901), dengan

demikian kuisisioner yang digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel sudah memberikan hasil yang konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai dari pengujian regresi linier sederhana diperoleh persamaan $Y = 2,067 + 0,552X$. Berdasarkan korelasi koefisien *pearson product moment* diperoleh nilai sebesar 0,584, maka korelasi antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan cukup. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh nilai *R square* sebesar 34,1%.

Dari pengujian hipotesis menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dapat dilihat pada pengujian hipotesis diatas taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$. Menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,806 sedangkan untuk t_{tabel} sebesar 2,048. Hal ini mengandung arti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan) di Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu termasuk dalam kategori baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu telah menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dengan sangat baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Hal ini tercermin dari rata-rata jawaban responden sebesar 4,31 yang berada pada interval 4,20 – 5,00 maka dikategorikan dalam kategori sangat baik.

Secara keseluruhan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu termasuk dalam kategori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang terbagi dalam 4 dimensi berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari hasil penyebaran kuisisioner kepada responden, penerapan atas standar akuntansi pemerintahan didapatkan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan materi standar akuntansi pemerintahan seperti seminar mengenai buletin teknis yang digelar oleh komite standar akuntansi pemerintahan. Pemahaman yang dimiliki oleh karyawan Bagian Akuntansi dan Aset pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berhubungan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengujian menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.

SARAN

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan judul tidak hanya fokus pada penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena masih banyak faktor lain yang ternyata mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan objek tidak terfokus hanya satu dinas dengan maksud agar terlihat penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah secara merata diterapkan di seluruh SKPD atau hanya di SKPD-SKPD tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Juwita, Rukmi. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal. Bandung: Politeknik Pos Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
- Nugraha, Wisnu. 2009. *Pengaruh Pemahaman Atas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Keefektifan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Sebagai Variabel Mediasi*. Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, Diana., 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelsaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado: Universitas Nam Ratulangi.
- Silviana. 2013. *Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

- Proceeding Call for Papers dan Seminar Nasional*. Solo: Fakultas Ekonomi UNS.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kelima belas. Bandung: Alfabeta.
- Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Journal S1 Ak*, Vol. 2. No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha.

